

Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah, *Tax Ratio*, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Pulau Sumatera

Gebby Yana Nabilah Yasmin¹, Idris²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: gebbyyasmin2004@gmail.com, idris_rara@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

2 Februari 2026

Disetujui:

28 Februari 2026

Terbit daring:

31 Maret 2026

DOI: -

Sitasi:

Yasmin, G. & Idris. (2026). Pengaruh Dana Transfer ke Daerah, *Tax Ratio*, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatera

Abstract:

This study aims to analyze the effect of transfer funds to regions, tax ratio, and open unemployment rate on poverty in Sumatra Island. The method used is panel data regression. The regression results show that transfer funds to the regions have no significant effect and are positively related to poverty. Meanwhile, the tax ratio and the open unemployment rate have a significant effect and are positively related to poverty. The findings of this study underscore the importance of optimizing the utilization of transfer funds, improving local tax performance, and encouraging sustainable job creation. To reduce poverty in Sumatra Island, local governments need to improve the quality of public spending, broaden the tax base, and strengthen employment policies.

Keywords: *Transfer Funds to Regions, Tax Ratio, Open Unemployment Rate, Poverty*

Abstrak:

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana transfer ke daerah, *tax ratio*, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. Metode yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil regresi menunjukkan bahwa dana transfer ke daerah tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan. Sementara itu *tax ratio* dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan. Temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya optimalisasi pemanfaatan dana transfer, peningkatan kinerja pajak daerah, dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas belanja publik, memperluas basis pajak, dan memperkuat kebijakan

Kata Kunci: Dana Transfer ke Daerah, *Tax Ratio*, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan

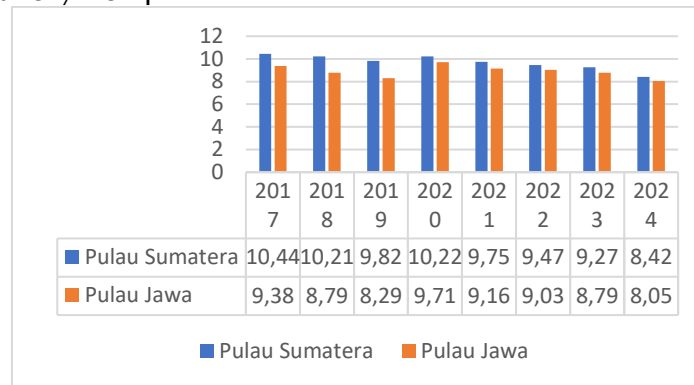
Kode Klasifikasi JEL: I32,H77,H20,E24

PENDAHULUAN

Terhadap masalah kompleks seperti kemiskinan, pemerintah perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai unsur yang memengaruhi kemiskinan, agar kebijakan yang diambil tepat dan dapat menyebabkan penyebab utamanya (Apia & Aimon, 2019). Secara global selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015–2030, di mana Tujuan 1 (*No Poverty*) menegaskan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya. s12 Tahun 2025, menempatkan penurunan kemiskinan sebagai agenda prioritas. Dalam perencanaan pembangunan nasional, pemerintah tidak hanya berupaya menurunkan kemiskinan secara agregat, tetapi juga memfokuskan sasaran pada wilayah yang memiliki kontribusi penduduk tertinggi agar dampak kebijakan menjadi lebih signifikan terhadap capaian nasional (Wibowo & Oktivalerina, 2022). Wilayah dengan populasi yang besar dan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi menjadi prioritas utama, sebab setiap perubahan kecil dalam angka kemiskinan di daerah tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap total kemiskinan nasional (Sulastri et al., 2025)

Populasi penduduk tertinggi di Indonesia berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan besarnya populasi yang terkonsentrasi di Pulau Jawa sekitar 57% dari total penduduk Indonesia, dan Pulau Sumatera sekitar 24% dari total penduduk Indonesia sehingga

perubahan tingkat kemiskinan di kedua pulau ini sangat menentukan pencapaian target penurunan kemiskinan nasional. Berikut perbandingan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa 2017-2024

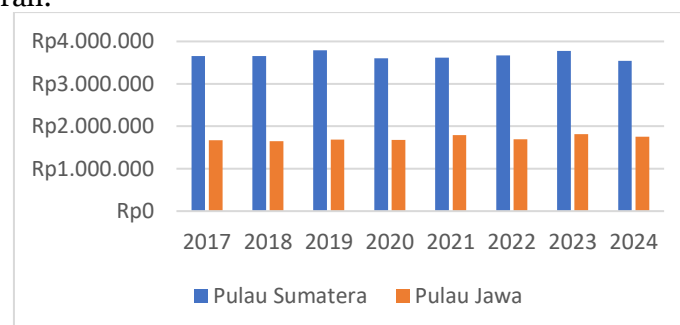


Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2017-2024

Gambar 1 Perbandingan Rata-Rata Kemiskinan di Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa 2017-2024

Sesuai dengan grafik menunjukkan kemiskinan di Pulau Sumatera konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Jawa selama 2017-2024. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan penurunan kemiskinan nasional pada 2024 menjadi 6-7%, Fakta bahwa pada tahun 2024 kemiskinan di Pulau Sumatera masih di atas Pulau Jawa menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan fiskal yang lebih terarah di Pulau Sumatera agar kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan nasional menjadi optimal.

Pemerintahan Indonesia awalnya menggunakan sistem sentralistik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dimana pemerintah pusat mengatur anggaran dan perencanaan menimbulkan berbagai persoalan dalam pembangunan ekonomi, karena dampaknya adalah meningkatnya angka kemiskinan akibat pembangunan yang tidak merata dan pelaksanaan program prioritas yang kurang efektif di berbagai daerah (Lisna et al., 2013). Kondisi ini menyebabkan reformasi keuangan daerah, yang mencakup otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai desentralisasi fiskal dimana pelimpahan pemerintahan dan kewenangan pengelolaan keuangan agar pemerintah daerah merencanakan dan membelanjakan anggaran secara mandiri. Berdasarkan kebijakan tersebut pemerintah menyalurkan dana Transfer ke Daerah berdasarkan jumlah penduduk dan kapasitas fiskal daerah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia 2017-2024

Gambar 2 Perbandingan Rata-Rata Dana Transfer ke Daerah di Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa 2017-2024

Grafik menunjukkan rata-rata dana transfer ke daerah di Pulau Sumatera konsisten lebih tinggi setiap tahun dibandingkan dengan Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan walaupun di Pulau Jawa memiliki penduduk yang lebih banyak dibandingkan Pulau Sumatera tetapi lebih

memperoleh dana lebih sedikit dibandingkan dengan Pulau Sumatera dan juga Pulau Sumatera menyumbang angka kemiskinan lebih tinggi di bandingkan dengan Pulau Jawa Ini menunjukkan adanya inefisiensi dalam pemanfaatan dana transfer daerah dan adanya ilusi fiskal yaitu daerah tampak "kaya" karena mendapatkan banyak dana, tetapi penurunan kemiskinan tidak sebanding dengan kapasitas fiskal daerah yang dimiliki.

Mengukur kapasitas fiskal bisa dilihat dengan efektivitas daerah dalam memungut pajak dari total produksi ekonominya atau *tax ratio*. sesuai dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan bahwa penerimaan yang bersumber dari pemungutan pajak dialokasikan untuk kepentingan daerah dengan tujuan utama mewujudkan kemakmuran masyarakat (Amami & Asmara, 2022), karena dengan mengumpulkan pajak pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan hal ini akan membantu daerah untuk tidak hanya bergantung terhadap transfer pemerintah pusat dan mewujudkan kemandirian fiskal di daerah tersebut (Alman et al., 2024). Dengan konfigurasi pendanaan yang banyak bertumpu pada transfer pemerintah, arah kebijakan belanja daerah ikut terdorong oleh ketersediaan dana tersebut. Apabila dikaitkan dengan perilaku pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber pendapatan, kondisi tersebut diduga menunjukkan fenomena *flypaper effect*, di mana pemerintah daerah cenderung mengalokasikan dana transfer secara berlebihan (overspending) terutama untuk belanja tidak langsung sehingga minim dampak terhadap percepatan pengentasan kemiskinan, sementara upaya menggali penerimaan pendapatan daerah sendiri (terutama pajak) tidak dioptimalkan.

Selain dari faktor fiskal, pengangguran juga berperan penting dalam kemiskinan, karena jika pengangguran di suatu daerah tinggi, maka memerlukan pengeluaran tambahan untuk belanja bantuan sosial, sehingga dapat menekan ruang fiskal daerah yang seharusnya dipergunakan untuk belanja modal produktif (Elia et al., 2020). Berdasarkan uraian literatur tersebut, keterkaitan antara faktor fiskal dan pasar tenaga kerja menunjukkan hubungan yang saling memperkuat terhadap kemiskinan, di mana alokasi Transfer ke Daerah umumnya diklasifikasikan ke dalam skema dana perimbangan yang mencakup (DAU, DAK, DBH). Selain itu, rasio pajak yang rendah mencerminkan basis pajak yang sempit dan ketergantungan tinggi pada transfer, sehingga ruang fiskal untuk program pengentasan kemiskinan menyusut. Selain dari sisi fiskal, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencerminkan inefisiensi dalam penyerapan tenaga kerja, TPT yang tinggi menekan output potensial, memperkecil basis penerimaan pajak, dan meningkatkan beban bantuan sosial, sehingga membatasi kemampuan fiskal daerah untuk intervensi yang efektif

Pulau Sumatera memiliki karakteristik yang berbeda maka dari itu diperlukan metode yang dapat mengakomodasi perbedaan antar wilayah dan menganalisis perubahan variabel dari waktu ke waktu secara lebih akurat sehingga penelitian ini menggunakan metode data panel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris untuk menjelaskan dinamika kemiskinan di Pulau Sumatera, dan diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja.

Teori Keynes (1973) sebagaimana tertuang dalam dalam karyanya yang berjudul *The General Theory Of Employment, Interest, and Money* dalam (DJPK, 2022) intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal diperlukan untuk menutup output gap yang timbul ketika permintaan agregat lemah. Dalam kondisi pengangguran tinggi, pemerintah meningkatkan belanja publik sehingga efek multiplier mendorong kenaikan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan fiskal diskresioner, seperti pemotongan atau pelambatan kenaikan pajak, untuk memperkuat efek stabilisasi tersebut (Khusaini, 2019)

Pada negara berkembang menurut Oates (1972) dalam Anwar (2023) Pemerintah menggunakan desentralisasi fiskal menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintah untuk memperluas otonomi dan dapat memperkecil ketimpangan vertikal dan horizontal (pemerintah pusat dan pemerintahan daerah) sebab pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebutuhan wilayahnya. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan pembangunan yang lebih terarah di masing-masing daerah sehingga meningkatkan perekonomian daerah (Ejobowah, 2018)

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan data sekunder dan kuantitatif, khususnya data panel provinsi-provinsi di Pulau Sumatera periode 2017-2024. Sumber data diperoleh dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP). Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi ini menggunakan aplikasi E-Views 12 untuk mendapatkan hasil regresi analisis data panel. Berikut model regresi dibuat untuk menemukan dan mengukur bagaimana variabel independen ini memengaruhi variabel dependen :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{LogTKD}_{it} + \beta_2 \text{LogTax}_{it} + \beta_3 \text{LogTPT} + \varepsilon_{it}$$

Diketahui : Y merupakan variabel dependen yaitu kemiskinan, variabel independen terdiri dari TKD yaitu dana transfer ke daerah, Tax yaitu *tax ratio*, dan TPT yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Berikut tahapan analisis regresi data panel :

- 1) Model estimasi data panel, dilakukan melalui tiga pendekatan model yaitu *fixed effect model*, *random effect model*, dan *common effect model*
- 2) Estimasi model data panel, digunakan beberapa pengujian yaitu Uji *chow*, uji *Hausman*, uji *Langrange Multiplier*
- 3) Uji asumsi klasik, dengan melakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi
- 4) Uji signifikansi, terdiri dari uji t (uji parsial), uji F (Simultan)
- 5) Koefisien determinasi (R^2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Pemilihan model data panel menggunakan uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *langrange multiplier*

- 1) uji *chow*, berdasarkan hasil regresi menunjukkan probabilitas < 0.05, maka model yang tepat dan sesuai adalah *fixed effect*.

Tabel 1 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	291.397626	(9,67)	0.0000
Cross-section Chi-square	295.395776	9	0.0000

- 2) uji *hausman*, berdasarkan hasil regresi menunjukkan probabilitas > 0.05, maka model yang tepat dan sesuai model *random effect*

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.538245	3	0.6735

- 3) uji *langrange multiplier*, berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai probabilitas > dari 0.05, maka model yang tepat dan sesuai moel *random effect*

Tabel 3 Hasil Uji Langrange Multiplier

	Cross-section	Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	241.6474	1.631132	243.2786
	(0.0000)	(0.2015)	(0.0000)

Selanjutnya, melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari :

- 1) Uji normalitas, Berdasarkan hasil estimasi, data penelitian ini menunjukkan distribusi yang normal, dengan nilai *skewness* berada dalam rentang +2 hingga -2, serta nilai *kurtosis* yang berada di antara +7 dan -7

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

	Kemiskinan	LogTKD	LogTax	LogTPT
Skewness	0.402022	-0.309222	-0.976338	0.335575
Kurtosis	1.707389	2.494828	4.278622	2.798570

- 2) Uji Multikolinearitas, hasil estimasi menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam penelitian ini, yang ditandai dengan nilai korelasi yang berada di bawah 0,80.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolienaritas

	LogTKD	LogTax	LogTPT
LogTKD	1.000000	0.277920	0.014153
LogTax	0.277920	1.000000	-0.109704
LogTPT	0.014153	-0.109704	1.000000

- 3) Uji Heteroskedastisitas, hasil estimasi didapatkan nilai probabilitas variabel independen > 0,05 sehingga data tidak terkena heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.
C	12.22442	8.145525	1.500752	0.1376
LOG(TKD)	-0.717182	0.536909	-1.335760	0.1856
LOG(TAX)	0.222846	0.540684	0.412156	0.6814
LOG(TPT)	-0.182045	0.384392	-0.473592	0.6371

- 4) Uji Autokorelasi, berdasarkan hasil regresi, nilai Durbin-Watson (D-W) yang berada di antara -2 dan +2 ($-2 < D-W < +2$) menunjukkan bahwa model tidak mengalami autokorelasi positif maupun negatif.

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

Durbin- Watson stat	0.576073
---------------------	----------

Selanjutnya melakukan uji signfikasi sebagai berikut:

- 1) Koefesien Determinasi, mengkaji pengaruh dana transfer ke daerah, tax ratio, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera, dengan indikator kemiskinan menjadi variabel dependen, menunjukkan nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,159363. Persentase ini menjelaskan bahwa sekitar 15,93% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh dana taransfer ke daerah, *tax ratio* dn tingkat pengangguran terbuka , sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model
- 2) Uji signfikasi simultan, Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh nilai F-statistik sebesar 4,802551 dengan probabilitas F sebesar $0.004072 < 0.05$, berarti variabel dana transfer ke daerah, *tax ratio*, dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama- sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera

Tabel 8 Hasil Uji Signifikasi

Variabel	Coeffecient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-22.86865	16.90209	-1.353007	0.1801
LOG(TKD)	1.938280	1.106363	1.751939	0.0838
LOG(TAX)	2.294584	0.964020	2.380226	0.0198
LOG(TPT)	1.900901	0.615477	3.088499	0.0028

Hasil regresi yang mengkaji pengaruh dana transfer ke daerah, *tax ratio*, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan menggunakan metode *random effect* diperoleh nilai koefesien regresi untuk setiap variabel dengan persamaan dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut :

$$\text{Kemiskinan} = -22.86864 + 1.93827(\text{LOGTKD}) + 2.29458 (\text{LOGTAX}) + 1.90090(\text{LOGTPT})$$

Pada persamaan diatas diketahui nilai konstanta yaitu sebesar -22.86 yang menjelaskan bahwa tanpa dipengaruhi variabel dana transfer ke daerah, *tax ratio*, serta tingkat pengangguran terbuka maka tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera adalah sebesar -22.86% atau tidak ada. Selain itu, persamaan ini mengindikasikan bahwa peningkatan dana transfer ke daerah sebesar 1% akan berkontribusi pada peningkatan kemiskinan sebesar 1,93%. Selanjutnya, kenaikan *tax ratio* sebesar 1% akan meningkatkan kemiskinan sebesar 2,29%, sedangkan kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1% maka peningkatan kemiskinan sebesar 1,90% juga akan terjadi.

Interprestasi Hasil Penelitian

1) Dana Transfer ke Daerah

Dari hasil regresi statistik menunjukkan variabel dana transfer ke daerah memiliki hubungan positif namun tidak terbukti signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0838 yang $>$ dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan dana transfer ke daerah justru berpotensi meningkatkan kemiskinan. Hal ini terbukti berbeda dengan teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972) yang membahas desentralisasi fiskal sebagai instrumen untuk mengarahkan pembangunan yang lebih terarah di masing-masing daerah sehingga meningkatkan perekonomian daerah.

Untuk menjelaskan mekanisme pengaruh dana transfer ke daerah terhadap kemiskinan, tidak cukup berfokus pada besaran anggaran tetapi perlu melihat bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dalam komposisi belanja daerah. Pemerintah daerah tidak bisa secara bebas menentukan pengalokasian anggaran untuk belanja daerah karena pembagian dana transfer ke daerah memiliki tujuan yang berbeda seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) bersifat spesifik cenderung mengarahkan belanja pada kegiatan tertentu, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat *block grant* sehingga memberi ruang fleksibilitas bagi daerah

Tabel 9 proporsi rata-rata jenis belanja di Pulau Sumatera 2017-2024

Jenis Belanja	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Modal	21%	19%	20%	15%	15%	17%	13%	15%
Belanja Pegawai	36%	36%	35%	37%	36%	35%	35%	38%
Belanja Barang & Jasa	23%	25%	25%	24%	27%	29%	29%	28%
Belanja Lainnya	20%	20%	20%	24%	22%	19%	20%	20%

Struktur belanja pemerintah daerah di Pulau Sumatera selama periode 2017–2024 membuktikan kecenderungan mengenai sebagian besar anggaran lebih banyak digunakan untuk belanja rutin, khususnya pada pos belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Sebaliknya, belanja modal yang termasuk dalam kategori belanja produktif dan berpeluang menciptakan kesempatan kerja justru cenderung kecil. Komposisi tersebut menjelaskan Dana Alokasi Umum (DAU) yang seharusnya bersifat fleksibel pada praktiknya menjadi kurang bebas karena ruang fiskal efektifnya terkunci untuk memenuhi belanja yang tergolong wajib dan operasional. Dominasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa mengindikasikan bahwa ketika dana transfer (termasuk DAU) meningkat, prioritas belanja cenderung tetap terarah pada pemenuhan kebutuhan rutin, bukan berorientasi pada belanja modal. Akibatnya, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak sepenuhnya berperan sebagai anggaran yang bisa dipakai daerah untuk mendorong belanja yang lebih produktif, melainkan berperan sebagai dana spesifik karena terserap pada belanja rutin.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Setyawan, 2023) menunjukkan bahwa dana transfer kedaerah menjadi respon fiskal terhadap kondisi kemiskinan, hal ini terjadi karena ketidakefisienan pengelolaan dana, dominasi belanja rutin, ketergantungan fiskal daerah, dan kurangnya pengalokasian untuk belanja modal yang seharusnya mampu menyerap tenaga kerja (Studi Kasus Provinsi Jawa Timur)

2) Tax Ratio

Dari hasil regresi statistik menunjukkan bahwa variabel *tax ratio* berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera, dengan nilai probabilitas sebesar $0,0198 < \text{dari } 0,05$. Hal ini mengindikasikan *tax ratio* nyata memengaruhi tingkat kemiskinan, di mana peningkatan *tax ratio* berpotensi menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan. Hal ini terbukti berbeda dengan teori *The Four Maxims* yang dikemukakan oleh Adam Smith, khususnya asas *equality* dan *convenience of payment* dimana sistem perpajakan yang adil seharusnya membebaskan pajak sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak serta tidak menekan daya beli kelompok berpendapatan rendah seperti sektor informal.

Tax Ratio berhubungan positif dengan tingkat kemiskinan karena Pulau Sumatera dominasi sektor informal yang ditandai oleh rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak.

Kondisi ini menyebabkan pemungutan pajak tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pelaporan pendapatan yang akurat, sehingga pemerintah cenderung meningkatkan penerimaan daerah dengan cara memperkuat intensitas pemungutan pajak yang bersifat umum dan tidak langsung, seperti pajak berbasis konsumsi yang cenderung bersifat regresif (Rias et al.,2024) Dalam kondisi tersebut, peningkatan *tax ratio* justru menambah beban sektor informal tanpa peningkatan produktivitas. Akibatnya, tekanan pajak yang tinggi akan menurunkan pendapatan perkapita wajib pajak sehingga meningkatkan kemiskinan.

Sejalan dengan (Fatmawati, 2025) yang menunjukkan indikasi bahwa kenaikan efektivitas pemerintah daerah dalam memungut pajak terhadap total produksi ekonomi belum otomatis diikuti oleh penurunan kemiskinan. Namun, dalam konteks banyak daerah di Pulau Sumatera, peningkatan *tax ratio* ini kerap berasal dari perluasan pajak yang cenderung bersifat regresif. Akibatnya, kenaikan pajak justru dapat menambah beban biaya penduduk miskin terutama jika struktur ekonomi masi didominasi sektor informal.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Dari hasil regresi statistik mengungkapkan variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera, dengan nilai probabilitas sebesar $0,0028 < 0,05$. Hal ini menandakan tingkat pengangguran terbuka nyata memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Ketika lebih banyak tenaga kerja tidak terserap maka akan menaikkan belanja bantuan sosial. Tekanan ini menyusutkan ruang fiskal untuk belanja modal produktif yang seharusnya menyerap tenaga kerja sehingga kemiskinan di Pulau Sumatera meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Keynes ketika perekonomian gagal menciptakan lapangan kerja yang cukup, pendapatan masyarakat menurun sehingga daya beli melemah dan jumlah penduduk miskin meningkat. Dalam hal ini, tingginya angka pengangguran terbuka di Pulau Sumatera menggambarkan bahwa belum optimalnya peran belanja daerah khususnya belanja modal produktif dalam mendorong aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Ketika belanja modal tidak mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang kuat maka pengangguran tetap tinggi sehingga kemiskinan semakin meningkat

SIMPULAN

Dana Transfer ke Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera tetapi memiliki hubungan positif yang menunjukkan peningkatan dana transfer ke daerah cenderung diikuti oleh peningkatan kemiskinan, tetapi menurut hasil regresi tersebut, dampaknya terlalu kecil untuk dijelaskan perubahan tingkat kemiskinan secara parsial. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya dana transfer yang diterima pemerintah daerah belum secara langsung maupun konsisten berdampak pada penurunan kemiskinan. Pemerintah daerah disarankan untuk memfokuskan kualitas pemanfaatan dana transfer yang berorientasi pada belanja modal produktif yang memiliki dampak terhadap peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan penciptaan kesempatan kerja.

Tax Ratio berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. Artinya semakin tinggi *tax ratio* akan meningkatkan kemiskinan. Hal tersebut terjadi disebabkan karena struktur ekonomi di Pulau Sumatera didominasi sektor informal sehingga pemerintah menaikkan pajak berbasis konsumsi yang cenderung bersifat regresif sehingga menekankan pendapatan perkapita wajib pajak. Pemerintah daerah memperluas basis pajak sehingga peningkatan penerimaan pajak bukan hanya dari pajak konsumsi, lalu mengarahkan penerimaan pajak untuk penyediaan infrastruktur ekonomi lokal yang dapat menurunkan biaya usaha, sehingga penerimaan pajak meningkat seiring naiknya produktivitas dan dapat meningkatkan pendapatan wajib pajak.

Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pengangguran

terbuka, maka kemiskinan cenderung meningkat. Kondisi ini terjadi karena semakin banyak penduduk usia produktif yang tidak terserap dalam pasar kerja, sehingga pendapatan keluarga menurun dan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah daerah memperkuat belanja modal produktif yang mendukung penyerapan tenaga kerja, sehingga pembangunan tidak hanya meningkatkan aset daerah tetapi juga memperluas lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Alman, F. Z., Alman, G. C., Rianto, R., Prakoso, L. Y., Soemantri, A. I., Prasetyo, H., Mujaddid, T. F. Al, & Bermans, S. (2024). Taxes: The Key to A Golden Indonesia 2045. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*, 2(7), 1105–1114. <https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i7.9773>
- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Anwar, A. I. (2023). *Ekonomi Kini dan Esok*.
- Apia, G., & Aimon, H. (2019). *Analysis of the Effect of Human Resources Investment and Economic Growth on Poverty Levels in the Island Province of Sumatra*.
- DJPK. (2022). *Local Taxing Power*.
- Ejobowah, J. B. (2018). The second-generation theory of fiscal federalism: A critical evaluation. *Perspectives on Federalism*, 10(1), 220–242.
- Elia, A., Yulianto, Y., Tiawon, H., Sustiyah, S., & Indrajaya, K. (2020). *Government expenditure and poverty reduction in the proliferation of new administrative areas of Central Kalimantan, Indonesia*.
- Khusaini, M. (2019). *Ekonomi publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., & Sutomo, S. (2013). Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 1–26. <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i1.01>
- Rias, W., Larosa, M., & Halawa, A. (n.d.). *ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DI SEKTOR EKONOMI INFORMAL*.
- Setyawan, D. (2023). PENGARUH DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DESA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 19–36. <https://doi.org/10.59827/jie.v2i3.93>
- Sulastri, E., Umar, A., Syaputra, K. A., & Zohandy, D. E. P. (2025). Peran Pemerintah Indonesia dalam Pemerataan Pembangunan Ekonomi di Daerah. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)*, 4(1), 22–28.
- Wibowo, E. A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 - 2018. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 97–119. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i1.117>